

**SINERGITAS *STAKEHOLDER* DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

Tusiana Dewi

NIM. 07011181924015

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
SINERGITAS *STAKEHOLDER* DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KOTA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

Tusiana Dewi

NIM. 07011181924015

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, 29 Mei 2023

Pembimbing

Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP.,M.AP

NIP. 198701052015041003



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911104994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**SINERGIAS *STAKEHOLDER* DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KOTA PALEMBANG**

Skripsi
Oleh:
TUSIANA DEWI
0701181924015

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal 15 Juni 2023

Pembimbing:

1. Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 198701052015041003

Tanda Tangan

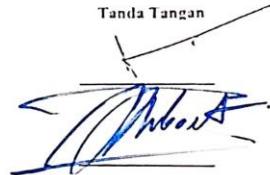


Penguji:

1. Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

2. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan

Administrasi Publik

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tusiana Dewi
NIM : 07011181924015
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Sinergitas *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palembang” ini benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang di temukan di skripsi ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat Pernyataan

Palembang, 30 Mei 2023



Tusiana Dewi

NIM. 07011181924015

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia”.

(Q.S Al-Baqarah : 83)

“No matter how difficult and hard something’s,

I will always be positive and smile like an idiot”

--Park Chanyeol—

Atas Ridho Allat SWT.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Kedua orang tua saya, Papa dan Mama**
- ❖ Kakak pertama dan kakak ipar saya**
- ❖ Kakak kedua, adik saya dan keluarga besar**
- ❖ Seluruh Dosen dan Pegawai FISIP Universitas Siwijaya**
- ❖ Teman seperjuangan**
- ❖ Almamater kuning tercinta, Universitas Siwijaya**

ABSTRACT

This study aims to determine Stakeholder Synergy in poverty alleviation in the city of Palembang. This research is motivated by the number of poverty in the city of Palembang which is in the highest position based on the city/district in the province of South Sumatra. This type of research uses qualitative methods. Research techniques using observation, interviews and qualitative documents. This study uses the theory of synergy from Najiyati and Rahmat with the communication dimension from Sofyandi and Garniwa (2007) and the coordination dimension from Tripethi and Reddy. The results of this study indicate that the Social Service as the main stakeholder has cooperation and coordination with other stakeholders which is quite poor even though they already have contributions to other stakeholders, while with the community their cooperation and coordination is only limited to checking data, proposing data, so that it is said that each -each of these stakeholders is not in accordance with the goals to be achieved in reducing poverty in the city of Palembang. The suggestion in this study is that there is a need for increased coordination within the existing network of stakeholders and government agencies are expected not only to provide data but also to be directly involved in the implementation of poverty alleviation programs.

Keywords: *Synergy, Stakeholders, poverty alleviation*

Advisor



Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP.,M.AP

NIP. 198701052015041003

Indralaya, June 2023

**Head of the Public Administration Department
Faculty of Social and Political Sciences, Sriwijaya University**



Dr. M. Nur Budiyanoto, S.Sos., MPA

NIP. 196911101994011001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sinergitas *Stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan di kota Palembang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kemiskinan di kota Palembang yang berada di posisi tertinggi berdasarkan kota/kabupaten di provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik penelitian menggunakan observasi, wawancara dan dokumen kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori sinergitas dari Najiyati dan Rahmat dengan dimensi komunikasi dari Sofyandi dan Garniwa (2007) dan dimensi koordinasi dari Tripethi dan Reddy. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial sebagai *Stakeholder* utama memiliki kerja sama dan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang cukup kurang baik meskipun sudah memiliki kontribusi pada *stakeholder* lainnya, sedangkan dengan masyarakat memiliki kerja sama dan koordinasi hanya sebatas pengecekan data, pengusulan data, sehingga dikatakan bahwa masing-masing dari *stakeholder* tersebut belum sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penanggulangan kemiskinan di kota Palembang. Saran dalam penelitian ini ialah Perlu adanya peningkatan koordinasi dalam jaringan *stakeholders* yang ada dan instansi pemerintah juga diharapkan tidak hanya sebagai penyedia data tetapi juga terlibat langsung dalam penerapan program penanggulangan kemiskinan.

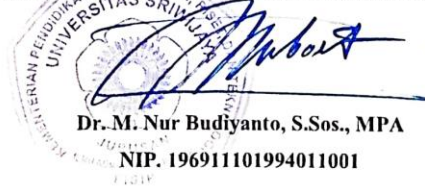
Kata Kunci: Sinergitas, *Stakeholder*, penanggulangan kemiskinan

Pembimbing



Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP.,M.AP
NIP. 198701052015041003

Indralaya, Juni 2023
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Sinergitas *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Palembang”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Penyusunan Skripsi ini mendapat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Orang tua saya tercinta dan tersayang, Bapak Meyedi dan Ibu Susi Lawati yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
2. Kakak pertama saya Zeta Ariano beserta kakak ipar Dika Damaiyanti, kakak kedua saya Okta Apriansyah, dan adik saya Arel Milo Xena yang selalu mendoakan dan memberi semangat untuk saya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU., ASEAN., ENG selaku Rektor Universitas Siwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos.,MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., S.H., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Gatot Budiarto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Dr. Sena Putra Prabujaya, SAP.,MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, kritikan dan saran yang membangun untuk kelancaran dalam penyelesaian Skripsi ini.
9. Ibu Ita Permata Sari, S,I.Kom selaku Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik yang telah membantu urusan administrasi.
10. Seluruh Dosen, Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh pegawai di Dinas Sosial Kota Palembang.
12. Seluruh pegawai di Badan Pusat Statistik Kota Palembang.
13. Teman grup yang penting selese yaitu Angelina Dwi Putri Panjaitan, Sekar Fahira, Shinta Dwipermata Sepdimia, Mery Mutiara, Anisa Andarwati dan Melly Arzila yang selalu bersama dari awal perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2019, terima kasih atas bantuan dan kerja samanya.
15. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara moril maupun materil.

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga hasil penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik itu jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya maupun pihak Dinas Sosial Kota Palembang serta pihak lainnya.

Penulis

Tusiana Dewi

NIM: 07011181924015

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PEGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Governance	12
2.2 Sinergitas	14
2.3 <i>Stakeholder</i>	18

2.4	Penanggulangan Kemiskinan.....	19
2.5	Penelitian Terdahulu	22
2.6	Kerangka Pikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Jenis Penelitian.....	38
3.2	Definsi Konsep.....	38
3.3	Fokus Penelitian.....	39
3.4	Jenis dan Sumber Data	40
3.5	Informan Penelitian	41
3.6	Teknik Pengumpulan Data	42
3.7	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV PEMBAHASAN.....		47
4.1	Deskripsi Wilayah.....	47
4.2	Deskripsi Informan.....	51
4.3	Hasil Penelitian	51
4.4	Pembahasan.....	71
4.5	Matrik Hasil Temuan Penelitian	74
BAB V PENUTUP		77
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN		82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah dan Persentase kemiskinan Negara Indonesia per Maret dan per September 2018-2022.....	4
Tabel 2 Jumlah dan Persentase kemiskinan Provinsi Sumatera.....	5
Tabel 3 Jumlah (Ribu) dan Persentase (%) kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021.....	6
Tabel 4 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 5 Fokus Penelitian	40
Tabel 6 Informan Penelitian	42
Tabel 8 deskripsi informan penelitian	51
Tabel 9 Rekapitulasi Data Terpadu Kesejahteraan	62
Tabel 10 Instansi-Instansi Yang Terkait.....	67
Tabel 11 Matrik Hasil Temuan Penelitian	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 17 goals dalam <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs).....	1
gambar 2 <i>Research Mapping</i>	9
gambar 3 Unsur-unsur <i>Governance</i> menurut Sedarmayanti (2009).....	13
gambar 4 Analisis Data pada Penelitian Kualitatif.....	45
gambar 5 wawancara dengan ibu Sri Munzilah, SE.....	53
gambar 6 wawancara dengan Ibu ED	54
gambar 7 wawancara dengan Ibu K.....	55
gambar 8 Jumlah Penerima Bantuan di kota Palembang	57
gambar 9 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	82
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	96
Lampiran 3 Landasan Hukum	98
Lampiran 4 SK Pembimbing Skripsi	99
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Skripsi.....	101
Lampiran 6 Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	103
Lampiran 7 Lembar Perbaikan Sidang Komprehensif	105
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian	106
Lampiran 9 Surat Izin Penelitian Dari Kasbangpol.....	108
Lampiran 10 Surat Balasan Dari Instansi	109
Lampiran 11 Surat Selesai Penelitian Dari Instansi	110
Lampiran 12 Formulir Pendaftaran Ujian Skripsi	111
Lampiran 13 Lembar Persyaratan Ujian Skripsi	112
Lampiran 14 Hasil Lulus Suliet/Usept Universitas Siwijaya.....	113
Lampiran 15 Surat Keterangan Pengecekan Similarity	114
Lampiran 16 Data Mahasiswa Forlap Diktif.....	118

DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
<i>Covid-19</i>	: <i>Corona virus disease 2019</i>
Dinsos	: Dinas Sosial
FTZ	: <i>Versus Free Trade Zone</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
JamKesMas	: Jaminan Kesehatan Masyarakat
KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
Perda	: Peraturan Daerah
PKH	: Program Keluarga Harapan
PPP	: <i>Purchasing Power Parity</i>
<i>SDGS</i>	: <i>Sustainable Development Goals</i>
TKPK	: Tim Khusus Penanggulangan Kemiskinan
UNDP	: <i>The UN Development Program</i>
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah Pembangunan yang secara berkesinambungan mendukung tumbuhnya kesejahteraan ekonomi masyarakat, pembangunan yang mendukung kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, dan pembangunan yang menjamin keadilan dan pelaksanaan manajemen yang efektif, yang mendukung pertumbuhan kualitas hidup masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kementerian PPN, 2020). *SDGs* ditetapkan di bulan September tahun 2015 yang berisikan 17 *goals* dan 169 target, 17 goals yang mencakup sebagai berikut.

Gambar 1 17 goals dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)



SDGs pada goals pertama yaitu tanpa kemiskinan akan tetapi negara Indonesia merupakan negara dengan masalah kemiskinan yang terbilang cukup tinggi dan

cukup mengkhawatirkan. Angka kemiskinan Indonesia di dunia pada tahun 2022 menduduki nomor 91 dari 100 negara yang masuk dalam kategori termiskin di dunia diukur melalui *Gross Domestic Product* (GDP) atau produk domestik bruto dan *Purchasing Power Parity* (PPP) atau keseimbangan kemampuan berbelanja tercatat angka Negara Republik Indonesia sebesar US\$ 14.535 atau jika dirupiahkan sebesar Rp.228.751.830,00.

Pemerintah telah mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan langsung tunai dan pelayanan khusus ibu hamil dengan balita. Program bantuan pendidikan, Jaminan Kesehatan Masyarakat (JamKesMas) akan tetapi program-program yang diberikan pemerintah untuk masyarakat yang dikategorikan miskin pada kenyaaannya tidak dirasakan oleh masyarakat yang mengalami kemiskinan, banyak bantuan yang diberikan pemerintah mengalami salah sasaran atau penerima bantuan tidak masuk dalam kategori masyarakat yang mangalami kemiskinan.

Pemerintah mengupayakan penanggulangan kemiskinan sebagai wujud upayanya untuk mencapai target nasional yang dituangkan dalam UUD NKRI Tahun 1945. Sila Kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial adalah untuk seluruh rakyat Indonesia dan pembukaan Undang-undang Keadilan Sosial. pada tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mewajibkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 berisi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” sedangkan Pasal 34 ayat (1) berisi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” menempatkan kewajiban kepada negara untuk mengurus fakir miskin dan anak-anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar, sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial masyarakat sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara untuk menjamin terwujudnya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu bekerja, yang berhak memperoleh manfaat, masyarakat tersebut ialah mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi. Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi “Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan dan non makanan”. Dan Ayat 9 yang berbunyi “Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat” (*Perda No 7 Tahun 2008.Pdf*, n.d.).

Jika berbicara tentang kemiskinan akan banyak penjelasan tentang berbagai faktor seperti faktor penyebab kemiskinan, penanggulangan serta bagaimana cara mengatasi kemiskinan tersebut. Beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab

terjadinya kemiskinan berdasarkan Sharp dalam Rivanti (2017:14) jika dilihat dari pandangan ekonomi.

- a. Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul akibat pola kepemilikan sumber daya yang timpang yang berujung pada distribusi pendapatan yang timpang.
- b. Ada ketidaksamaan dalam kualitas SDM.
- c. Karena ketidaksamaan dalam akses ke modal.

Tingkat kemiskinan Indonesia menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan jumlah dan persentase kemiskinan di Indonesia tahun 2018-2022, yaitu:

Tabel 1 Jumlah dan Persentase kemiskinan Negara Indonesia per Maret dan per September 2018-2022

Tahun	Per Maret		Per September	
	Juta Jiwa	%	Juta Jiwa	%
2018	25,95	9,82	25,67	9,66
2019	25,14	9,41	24,79	9,22
2020	26,42	9,78	27,55	10,19
2021	27,54	10,14	26,50	9,71
2022	26,16	9,54	26,36	9,57

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Menurut laporan BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat persentase penduduk miskin negara Indonesia sebesar 9,54% atau 26,16 juta jiwa per Maret 2022, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,17% dibandingkan dengan per September 2021 sebesar 9,71% atau 26,50 juta jiwa. Akan tetapi angka penurunan ini masih diatas sebelum masuknya pandemi Covid-19 pada per September tahun 2019 sebesar 9,22% atau 24,79 juta jiwa, selama masa pandemi Covid-19 tingkat kemiskinan Indonesia meningkat menjadi 2 digit per September 2020 sebesar 10,19% atau 27,55 juta jiwa dan masih berada pada angka 2 digit per Maret 2021 sebesar 10,14% atau

27,54 juta jiwa meskipun masih berada pada angka 2 digit per Maret 2021 mengalami penurunan dari per September 2020 sebesar 0,5%.

Tabel 2 Jumlah dan Persentase kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan per Maret dan per September 2018-2022

Tahun	Per Maret		Per September	
	Ribu Jiwa	%	Ribu Jiwa	%
2018	1.068,27	12,80	1.076.40	12,08
2019	1.073,74	12,71	1.067,16	12,56
2020	1.081,58	12,66	1.119,65	12,98
2021	1.113,76	12,84	1.116,61	12,79
2022	1.044,69	11,90	1.054.99	11,95

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera selatan jika dilihat dari 5 tahun terakhir 2018-2022 tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang berbeda jauh, persentase kenaikan tertinggi 5 tahun terakhir itu ada di per September 2020 dengan 12,98% atau 1.119,65 Ribu jiwa hampir mencapai angka 13%. Jika dibandingkan dengan penurunan terendah 5 tahun terakhir ada di per Maret 2022 dengan persentase 11,90% atau 1.044,67 Ribu Jiwa. Dari kenaikan tertinggi per September 2020 dan terendah per Maret 2022 memiliki selisih penurunan sebesar 1,08% atau 74,98 Ribu jiwa.

Tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah kemiskinan tertinggi dari 2018-2021 berada di kota Palembang sedangkan untuk jumlah kemiskinan terendah berada di kota Pagaralam, kota Palembang dari tahun 2018-2021 selalu mengalami kenaikan jumlah kemiskinan dapat terlihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Jumlah (Ribuan) dan Persentase (%) kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan 2018-2021

Kabupaten/Kota	2018		2019		2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Ogan Komering Ulu	45,71	12,61	46,84	12,77	47,30	12,75	48	12,62
Ogan Komering Ilir	124,86	15,28	124,14	15,01	123,34	14,73	125	14,68
Muara Enim	78,58	12,56	78,75	12,41	79,27	12,32	80	12,32
Lahat	65,31	16,15	65,03	15,92	65,75	15,95	68	16,46
Musi Rawas	54,75	13,76	53,82	13,37	54,95	13,50	57	13,89
Musi Banyuasin	105,15	16,52	105,83	16,41	105,38	16,13	105	15,84
Banyuasin	95,29	11,32	96,55	11,33	96,27	11,17	94	10,75
Ogan Komering Ulu Selatan	37,87	10,64	37,92	10,53	39,50	10,85	41	11,12
Ogan Komering Ulu Timur	70,65	10,57	70,40	10,43	71,10	10,43	73	10,60
Ogan Ilir	55,85	13,19	57,06	13,31	57,97	13,36	61	13,82
Empat Lawang	30,20	12,25	30,68	12,30	31,89	12,63	34	13,35
Pali	25,78	13,81	25,47	13,47	24,17	12,62	25	12,91
Musi Rawas Utara	36,19	19,12	36,63	19,12	37,75	19,47	40	20,11
Palembang	179,32	10,95	180,67	10,90	182,61	10,89	194,12	11,34
Prabumulih	20,95	11,39	21,62	11,61	21,71	11,59	24	12,20
Pagar Alam	12,07	8,77	12,37	8,90	12,71	9,07	13	9,40
Lubuk Linggau	29,74	13,02	29,68	12,95	29,80	12,71	32	13,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang

Penanggulangan kemiskinan yang terjadi diberbagai tempat di Provinsi Sumatera Selatan terutama di Kota Palembang, jika dilihat dari badan pusat statistik kota palembang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi dan juga terus meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2021 belum ada terjadinya penurunan, tingkat kemiskinan tertinggi kota Palembang berada pada tahun 2021 dengan persentase 11,34% atau 194 Ribu Jiwa.

Pemerintah kota palembang harus memiliki upaya dalam penanganan kemiskinan supaya tidak mengalami kenaikan kembali, hal ini menjadi target dari pemerintah kota pelambang. Bagaimana suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan sehingga *stakeholder* dapat mengupayakan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan Najiyati dan Rahmat (2011) mengemukakan sinergitas berupa paduan unsur atau kombinasi atau bagian yang dapat memperoleh hasil yang lebih baik dan lebih besar. Adanya interaksi antar ketiga *stakeholders* diperlukan adanya sinergi antar ketiga *stakeholder* tersebut, jadi sinergi dapat dipahami melalui operasi gabungan, perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.

Penelitian terdahulu mengenai *stakeholder* sudah dilakukan oleh penelitian sebelumnya seperti penelitian dari Lena Haryati, Saptono Nugroho dalam artikel jurnal yang berjudul Sinergi Stakeholder Dalam Mewujudkan Aktivitas Pariwisata Di Desa Wisata Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung dengan teori yang dipakai ialah Pitana dan Gayatri (2005). Dari penelitian di ketahui bahwa sinergi antar *stakeholder* di Desa Wisata Baha belum adanya persepsi yang sama dari masing-masing stakeholder yang terlibat, meskipun setiap stakeholder sudah

memiliki kontribusi pada stakeholder yang lainnya. Kemudian belum adanya dukungan atau partisipasi yang bersifat baik dari masyarakat lokal (Haryanti & Nugroho, 2018).

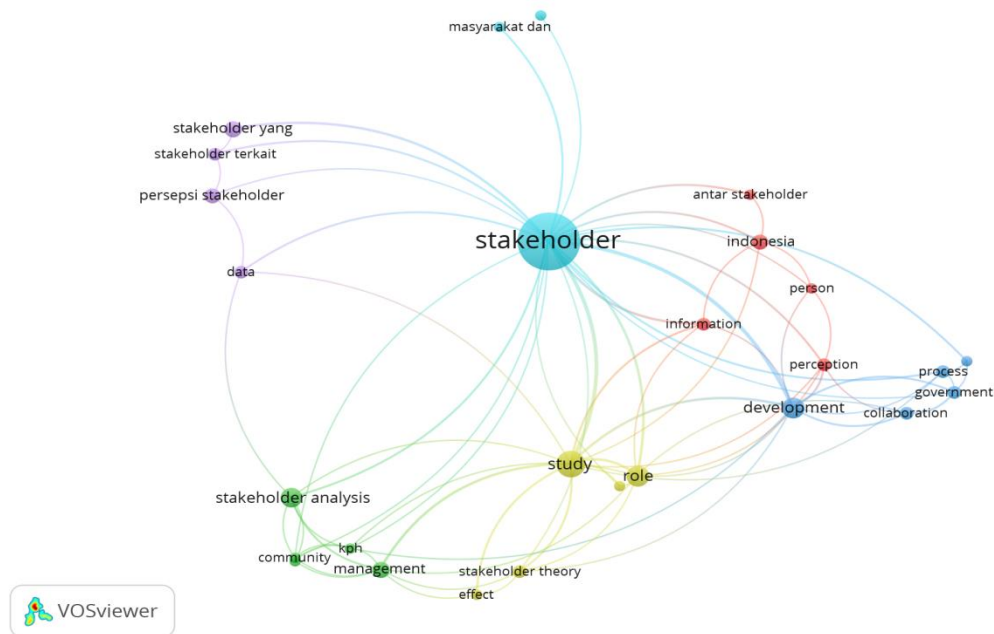
Perbedaan stakeholder juga didukung oleh penelitian oleh Rikson Pandapotan Tampubolon dengan judul jurnal Analisis Persepsi *Stakeholder* Terkait Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) *Versus Free Trade Zone (FTZ)* Di Kota Batam bahwa ada perbedaan persepsi antar para pemangku kepentingan tentang sistem yang terbaik dalam optimalisasi ekonomi Batam agar segera diselesaikan, pemerintah pusat harus menggunakan pendekatan dari bawah ke atas untuk menampung aspirasi dari para pemangku kepentingan yang paling sering bersentuhan dengan permasalahan yang ada (Tampubolon, 2018).

Berdasarkan penelitian oleh Rizky Dwi Gustina, Massadun dengan judul Peran *Stakeholder* Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selaan menggunakan teori Spillane (dalam Kurniawati 1994), Hamid & Hakim (2018) menunjukkan bahwa terdapat dua kategori stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan wisata yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas PU, dan Dishub sebagai *stakeholder* kunci dan masyarakat lokal sebagai stakeholder primer. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kapasitas yang rendah karena belum mampu mengelola wisata dengan baik. Oleh karena itu, wisata tersebut dikelola oleh masyarakat yang menyebabkan kondisi atraksi serta fasilitas wisata kurang terawat (Gustina & Mussadun, 2018).

Pemangku kepentingan memiliki tanggungjawab yang besar dalam instansi atau organisasi maupun lingkungan masyarakat, tetapi terdapat kelemahan yang

dimiliki oleh *stakeholder* seperti tanggungjawab belum dilakukan secara optimal dan kurangnya komunikasi antar *stakeholder* yang menyebabkan sering terjadinya perbedaan pendapat antar *stakeholder* satu sama lain.

gambar 2 Research Mapping



Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Vosviewer

Berdasarkan *Research Mapping* diatas yang diolah menggunakan *Vosviewer* dapat diketahui bahwa topik mengenai *stakeholder* berhubungan dengan *government*, *collaboration*, antar *stakeholder*, *management*, masyarakat dan lainnya. Kata yang digunakan 27 items terdiri 6 Clusters dan 77 link dengan total link strenght 116, dari beberapa jurnal yang diolah menggunakan *vosviewer* di dapatkan hasil seperti gambar diatas. Jika dilihat fokus berada pada *stakeholder* dan lingkaran kecil yang merupakan objek yang berbeda, memiliki keterkaitan dengan *stakeholder*.

Menurut beberapa penelitian terdahulu sudah ada yang membahas tentang *Stakeholder* seperti penelitian dari Lena Haryanti dan Saptono Nugroho (2018), Yani

Talakua (2018), Ni'mah, Simon dan Dedy (2019), Feronica, Luchman dan Sunarti (2020) namun pada penelitian sebelumnya memiliki tempat dan topik yang berbeda, dari teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu juga ada beberapa teori seperti, teori dari Pitana dan Gayatri (2005) dan teori Spillane (dalam Kurniawati 1994), Hamid & Hakim (2018) sedangkan terdapat jurnal yang tidak ditemukan teori yang digunakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Najiyati dan Rahmat (2011).

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas dan pentingnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, maka perlunya dilakukan penelitian tentang “Sinergitas *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palembang” Penelitian ini akan berfokus di kota Palembang yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi selama 5 tahun terakhir.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penjelasan latar belakang diatas, maka perumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Sinergitas *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palembang?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendukung Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sinergitas *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palembang

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian Sinergitas *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Palembang, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara konseptual dalam sinergitas *stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan di kota palembang sehingga untuk selanjutnya dapat di jadikan sebagai bahan referensi untuk mencari solusi mengenai permasalahan kemiskinan yang ada di provinsi sumatera selatan terkhususnya di kota palembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara praktis sehingga dapat diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang atau pihak-pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan di kota palembang terutama yang terkait dengan sinergitas *stakeholder*.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Hidayah, N., Hutagalung, S. S., & Hermawan, D. (2019). Analisis Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Alam Dan Sejarah Di Kelurahan Pajaresuk Kabupaten Pringsewu. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2179>
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Bibin, M., Vitner, Y., & Imran, Z. (n.d.). *Analysis of stakeholder in the development of Labombo Beach sustainable town in Palopo City Analisis pemangku kepentingan dalam pengembangan wisata bahari Pantai Labombo secara berkelanjutan di Kota Palopo*. 62–71.
- Creswell, W. J., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John W. Creswell & J. David Creswell - Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches \(2018\).pdf](file:///C:/Users/Harrison/Downloads/John%20W.%20Creswell%20&%20J.%20David%20Creswell%20-%20Research%20Design_%20Qualitative,%20Quantitative,%20and%20Mixed%20Methods%20Approaches%20(2018).pdf)[file:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley Ltd./Mendeley Desktop/Downloaded/Creswell, Cr](file:///C:/Users/Harrison/AppData/Local/Mendeley%20Ltd./Mendeley%20Desktop/Downloaded/Creswell,%20Cr)
- Gustina, R. D., & Mussadun, M. (2018). Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 144. <https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.144-154>
- Haryanti, L., & Nugroho, S. (2018). Sinergi Stakeholder Dalam Mewujudkan Aktivitas Pariwisata Di Desa Wisata Baha, Kecamatan Mengwi, Kabupaten

Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 5(2), 195.
<https://doi.org/10.24843/jdepar.2017.v05.i02.p03>

Kementerian PPN. (2020). Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi - Edisi II Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). *Kementerian PPN*.

Khomzi, I. R., Handono, S. Y., & Trianawati, A. (2020). Sinergisitas Stakeholder Dalam Pengembangan Desa Wisata Pujon Kidul Kabupaten Malang. *Agribusiness Journal*, 13(2), 25–35. <https://doi.org/10.15408/aj.v13i2.13948>

Mahfud, M. A. Z., Haryono, B. S., & Anggraeni, N. L. V. (2014). Peran Koordinasi Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan inapolitan. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 3(12), 2070–2076.

Perda No 7 Tahun 2008.pdf. (n.d.).

Pramono, J., & Kinasih, W. (2019). Sinergitas Antar Stakeholder Dalam Penyelenggaraan Kamtibmas di Kelurahan Gilingan kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. *Research Fair Unisri*, 3(1), 298–309.
<file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf>

Samosir, D. I. P. (2020). *Peran stakeholder dalam pembangunan pariwisata di pulau samosir. 1*, 42–52.

Sunarti, S., Yuliasuti, N., & Indriastjario, I. (2018). Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyediaan Perumahan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kota Salatiga. *Tataloka*, 20(4), 455.
<https://doi.org/10.14710/tataloka.20.4.455-471>

Surendra, G., Jendrius, & Indraddin. (2018). Keterlibatan Stakeholder Dalam Pengembangan Kubu Gadang Sebagai Desa Wisata Di Padang Panjang. *Artikel*, 8(2), 117–129.

Talakua, Y. (2018). Peran Stakeholder dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Kota Ambon. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 1.
<https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22890>

- Tampubolon, R. P. (2018). Analisis Persepsi Stakeholder Terkait Implementasi Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Versus Free Trade Zone (Ftz) Di Kota Batam. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 6(2), 64–69. <https://doi.org/10.33884/jimupb.v6i2.679>
- Tunjungwulan, T. L., & Hanani, A. D. (2019). Stakeholder Analysis Approach: Who Is Authorized to Regulate the National Health Insurance Benefits? *IPTEK Journal of Proceedings Series*, 0(5), 593. <https://doi.org/10.12962/j23546026.y2019i5.6438>
- Widodo, E. S., & Nugroho, K. (2021). Peran Stakeholder Dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Kampung Keluarga Berencana: Studi Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)*, 7(1), 66. <https://doi.org/10.20473/pi.v7i1.31098>
- Yusrafitri, S. R. (2021). Sinergitas Stakeholders Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2013–2015.